

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA****ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF BUDGETREALIZATION IN NORTH  
SULAWESI PROVINCIAL FORESTRY SERVICE**

Oleh :

<sup>1</sup>Christover Lantu<sup>2</sup>Linda Lambey<sup>3</sup>Anneke Wangkar<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

<sup>1</sup>[christoverlantu@yahoo.com](mailto:christoverlantu@yahoo.com)<sup>2</sup>[lindalambey@yahoo.com](mailto:lindalambey@yahoo.com)<sup>3</sup>[annekewangkar@yahoo.com](mailto:annekewangkar@yahoo.com)

**Abstrak :** Masyarakat era modern menuntut pemerintahan yang bersih atau *good governance* yang dapat menyediakan informasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi indikator kinerja keuangan suatu entitas sektor publik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara periode 2013 – 2015 apakah telah efektif dan efisien. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan perhitungan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2013 berada pada kategori cukup efektif. Tingkat efektivitas tahun 2014 dan 2015 berada pada kategori efektif. Perbedaan tingkat efektivitas 2013 dengan 2014 dan 2015 disebabkan adanya program yang tidak direalisasikan dan program-program lain yang tidak direalisasikan secara optimal. Hasil penelitian untuk tingkat efisiensi pada tahun 2013 – 2015 berada pada kategori sangat efisien. Pengalokasian anggaran belanja tahun 2013 lebih besar dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Ini dikarenakan adanya pengadaan barang/jasa dan belanja modal baru pada tahun 2013 tersebut, sehingga pada tahun 2014 dan 2015 sudah tidak perlu pengadaan barang/jasa dan belanja modal yang baru.

**Kata kunci :** *anggaran, belanja, efektivitas, efisiensi*

**Abstract :** Society in modern era requires good governance to provide the information of the accountability and the transparency in fiscal management. Budgets managed by public sector should apply the principles of efficiency and effectiveness that are indicators of the financial performance of a public sector entity. The purpose of this study is to analyze the application of budget expense realization by North Sulawesi Provincial Forestry Service in a period of 2013 to 2015 whether effectively and efficiently or not. The analytical method used in this research is descriptive quantitative with measurement calculation of effectiveness and efficiency. The results of the effectiveness of 2013 are in the category of effective enough. The effectiveness levels of 2014 and 2015 are in the effective category. The differentiation of effectiveness level in 2013 with 2014 and 2015 is due to unrealized programs and other programs that are not realized optimally. The results of the research for the efficiency level in 2013 to 2015 are in very efficient category. The budget allocation for 2013 is bigger than 2014 and 2015. This is because of the procurement of goods/services and new capital expenditures in 2013, so that in 2014 and 2015 there is no need for procurement of goods/services and new capital expenditures.

**Keywords :** *budget, expense, effectiveness, efficiency*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang/jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. (Rai : 2009). Hal ini menumbuhkan keinginan masyarakat akan pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan penegakkan akuntabilitas publik di instansi pemerintahan.

Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Transparansi merupakan kondisi adanya keterbukaan secara penuh, juga merupakan salah satu elemen penopang akuntabilitas. Dengan demikian, transparansi merupakan kunci untuk membangun lingkungan yang memiliki akuntabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta semakin dipertegas melalui pasal 54 ayat (2) yang mengatakan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) , menjelaskan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien pada ayat (5) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

### Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara
2. Mengetahui efisiensi anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Lubis (2010:2) menyatakan akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari rekayasa penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Firdaus dan Wasilah ( 2012:17), akuntansi (*accounting*) merupakan suatu kegiatan atau jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

### Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:62) menyatakan anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat

kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat.

### **Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik.**

Mardiasmo (2009:66) membagi anggaran sektor publik menjadi dua, yaitu:

1. **Anggaran Operasional**  
Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang setiap tahun. Pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.
2. **Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investment budget*)**  
Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal/investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Adapun tujuan Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

### **Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 3, pengelolaan keuangan daerah diatur dengan kekuasaan pengelolaan daerah, asas umum dan APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Balai Layanan Umum Daerah).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. (Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan SKPD). LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah

dilakukan serta hasil yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi.

### **Belanja Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

1. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
2. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.
3. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut contoh klasifikasi belanja menurut fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Sujarweni (2015:60) dalam kutipan Lewadalu (2016:12) menyatakan APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 dijelaskan mengenai ketentuan umum penyusunan APBD :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :

- a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
- b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **Efektivitas Belanja**

Nordiawan dan Hertianti (2010:161) menyatakan efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan.

Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau *spending wisely*. Berikut ini adalah faktor penentuan efektif dan efisien :

1. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana;
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik sturuktur maupun fungsional;
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

Faktor pimpinan berperan penting dalam mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. (Rondonuwu, 2011).

### **Efisiensi Belanja**

Nordiawan dan Hertianti (2010:161) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Efisiensi dapat ditingkatkan dengan empat cara sebagai berikut :

1. Menaikan *output* untuk *input* yang sama;
2. Menaikan *output* lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*;
3. Menurunkan *input* untuk *output* yang sama;
4. Menurunkan *input* lebih besar daripada proporsi penurunan *output*

### **Penelitian Terdahulu**

Handoko (2013) Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Hasil penelitian menyatakan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya presentase selisih anggaran dalam kurun tahun 2011 dan 2012 cenderung meningkat atau membaik dari segi efisien dan efektivitas.

Pangkey (2015) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menyatakan periode anggaran belanja 2010-2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhannya tidak efektif. Tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-2014 tidak efisien.

Untari (2015) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung periode 2011 – 2014 di SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tingkat efisiensi belanja langsung periode 2011 – 2014 sudah efisien dalam penggunaan anggaran yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat bermanfaat semakin baik (*spending well*). Pencapaian belanja langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011 – 2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.

Yunianti (2014) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa efisiensi kinerja keuangan periode 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

1. Data Kualitatif  
Kuncoro (2003:123) mengatakan bahwa data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian.
2. Data Kuantitatif  
Kuncoro (2003:123) mengatakan bahwa data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka dan tabel.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan Pumorow, Banjer, Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada 26 November – 6 Desember 2016.

### Prosedur Penelitian

1. Melakukan permohonan izin penelitian pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Mengumpulkan data yang diperlukan.
3. Melakukan proses pengolahan data dan analisis tentang tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja.
4. Membuat hasil pembahasan dan penelitian.
5. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

### Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan untuk menganalisis adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode ini menggambarkan atau membandingkan dan menguraikan suatu data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari data tersebut untuk melengkapi penelitian ini. Rumus yang digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut.

1. Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja**

Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total target anggaran belanja.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{16,904,789,692}{19,246,235,058} \times 100\% = 87,83\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{14,241,480,492}{15,159,928,123} \times 100\% = 93,94\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{15,229,227,244}{15,872,940,455} \times 100\% = 95,94\%$$

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2013	Rp.19,246,235,058	Rp.16,904,789,692	87,83	Cukup Efektif
2014	Rp.15,159,928,123	Rp.14,241,480,492	93,94	Efektif
2015	Rp.15,872,940,455	Rp.15,229,227,244	95,94	Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara (Data Olahan 2017)

Pada tahun 2013, tingkat efektivitas sebesar 87,83 % yang termasuk kategori cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 2014, tingkat efektivitas berada pada angka 93,94% yang termasuk dalam kategori efektif. Dan yang terakhir pada tahun 2015 yang tingkat efektivitasnya sebesar 95,94 % dan memenuhi kategori efektif.

#### Hasil Penelitian Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja

Tingkat efisiensi dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{8,046,922,061}{16,904,789,692} \times 100\% = 47,60$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{3,374,161,948}{14,241,480,492} \times 100\% = 23,69$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{3,301,925,287}{15,229,227,244} \times 100\% = 21,68$$



Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Belanja	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
2013	Rp.8,046,922,061	Rp.16,904,789,692	47,60	Sangat Efisien
2014	Rp.3,374,161,948	Rp.14,241,480,492	23,69	Sangat Efisien
2015	Rp.3,301,925,287	Rp.15,229,227,244	21,68	Sangat Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara (Data Olahan 2017)

Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dari periode 2013-2015 secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat efisien. Dimulai pada tahun 2013 dengan tingkat efisiensi sebesar 47,60%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 tingkat efisiensi sebesar 23,69% dan tahun 2015 tingkat efisiensi sebesar 21,68%.

### Pembahasan

1. Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja  
Realisasi anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 berada pada kategori cukup efektif dengan 87,83%. Ditahun selanjutnya yaitu tahun 2014, tingkat efektivitasnya naik menjadi 93,94% dan berada pada kategori efektif. Pada tahun berikutnya yaitu 2015 tingkat efektivitasnya naik dengan presentase mencapai mencapai 95,94% dengan kategori efektif. Pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya 87,83% dengan kategori cukup efektif dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015. Ini disebabkan adanya “program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan” yang mana hanya direalisasikan pada “uang lembur PNS” untuk penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Sementara untuk “belanja alat tulis kantor” dan “belanja alat cetak” tidak direalisasikan karena kedua belanja tersebut sudah direalisasikan pada “program pelayanan administrasi perkantoran” sehingga sudah tersedia alat tulis kantor dan alat cetak yang diperlukan. Ada juga beberapa program belanja yang direalisasikan namun tidak optimal atau tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Dinas Kehutanan belum mampu mengelola anggaran belanjanya. Tetapi pada tahun 2014 dan 2015 Dinas Kehutanan sudah mulai memperbaiki pengelolaan anggaran belanja sehingga tingkat efektivitas anggaran belanja dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Kehutanan telah sadar akan pentingnya perbaikan kinerja keuangan yang optimal.
2. Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja  
Realisasi anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 - 2015 kesemuanya berada pada kategori sangat efisien. Pada tahun 2013 tingkat efisiensi sebesar 47,60%. Tahun selanjutnya 2014 sebesar 23,69% dan pada tahun yang terakhir yaitu 2015 sebesar 21,68%. Dinas Kehutanan telah berhasil dalam mengelola anggaran belanja dengan menggunakan *input* tertentu dan menghasilkan *output* yang optimal.

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada tahun 2013 sebesar 87,83% yang berada pada kategori cukup efektif. Namun berbeda dengan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada tahun 2014 sebesar 93,94% dan tahun 2015 sebesar 95,94% yang berada pada kategori efektif. Ini disebabkan oleh adanya program belanja yang tidak direalisasikan dan beberapa program lain yang realisasinya tidak optimal sehingga tidak mencapai target.
2. Tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2015 secara keseluruhan berada dalam kategori sangat efisien. Hasil ini memberitahukan bahwa Dinas Kehutanan telah berhasil dalam mengelola anggaran belanja dengan menggunakan *input* tertentu dan menghasilkan *output* yang optimal.
3. Perbedaan anggaran belanja yang cukup besar pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2014 dan 2015 disebabkan oleh pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal yang baru pada tahun anggaran 2013 tersebut, sehingga pada tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2014 dan 2015 Dinas Kehutanan sudah tidak perlu lagi melakukan pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal yang sudah dilakukan pada tahun 2013 sebelumnya.
4. Dinas Kehutanan telah menerapkan kerjasama yang baik dan terorganisir serta koordinasi antara setiap bidang organisasi, dan menumbuhkan kesadaran kepada seluruh pegawai akan pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan dengan tidak mengesampingkan sifat efektif dan efisien.

### Saran

Peneliti menyarankan agar pada priode-periode berikutnya untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan agar supaya realisasi anggarannya optimal dan meningkatkan kinerja keuangannya sehingga bisa mempertahankan kriteria sangat efektif dan pengelolaan anggaran belanja yang cermat, memilih *input* serta cermat dalam pengelolaannya untuk dapat menghasilkan *output* yang sebesar-besarnya dan mempertahankan kriteria sangat efisien yang telah dicapai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus Ahmad, Wasilah Abdulalah. 2012. *Akuntansi Biaya*, Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Handoko, Abdurrohman Wiro. 2013. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya ( Tahun Anggaran 2011 – 2012 )*
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Lewadalu, Grace. 2016. *Evaluasi Penatausahaan, Penyusunan. Dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Lubis Arfan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi Kedua. Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, ANDI.

Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, BPFE.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan SKPD. 2014.

Nordiawan, Deddi dan Hertianti Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2 .Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 690.900.327 Tahun 1996. *Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.

Pangkey, Immanuel. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Periwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 690.900.327 Tahun 1996. *Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.

Rai, I Gusti. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta, Salemba Empat.

Rondonuwu, Ritno. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USRAT.

Sujarweni, Wiratna. 2016. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Pres, Yogyakarta.

Untari, Rusita. 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Undang-undang No.17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.

Yunianti, Umi. 2014. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) studi kasus pada APBDesa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Yogyakarta*.